



**LAPORAN EVALUASI INTERNAL
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
TRIWULAN II TAHUN 2026**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TRIWULAN II
TAHUN 2026**

Pada hari ini Rabu, tanggal 15 Juli 2026, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos
NRP : 70060445
Jabatan : Deputi Bidang Penindakan

2. Nama : Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si., Apt., M.E.
NIP : 19810304 200312 1 001
Jabatan : Ketua Tim SAKIP Deputi Penindakan

Telah melaksanakan evaluasi internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Deputi Bidang Penindakan periode 01 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 dengan hasil sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja dan Anggaran per Output

No	Rincian Output	Volume							Anggaran						
		Target	B4	%	B5	%	B6	%	*Pagu (Ribu)	B4 (Ribu)	%	B5 (Ribu)	%	B6 (Ribu)	%
1	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	4	2	50	2	50	2	50	310.464	107,113	34,5	117,448	37,83	134,537	43,33
2	Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	8	1	12,50	2	25	5	62,50	2.117.118	615.924	29,09	711.033	33,58	1.252.538	59,16
3	Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	1	0	0	1	100	1	100	881.726	148.406	16,83	217.502	24,67	330.889	37,53
4	Dokumen Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan	4	0	0	0	0	0	0	1.373.058	164.427	11,98	384.677	28,02	526.382	38,34
5	Rekomendasi Intelijen yang Berkualitas	19	5	26,32	8	42,11	10	52,63	1.348.283	196.488	14,57	315.744	23,42	631.880	46,87

No	Rincian Output	Volume							Anggaran						
		Target	B4	%	B5	%	B6	%	*Pagu (Ribuan)	B4 (Ribuan)	%	B5 (Ribuan)	%	B6 (Ribuan)	%
6	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	3	0	0,00	0	0,00	1	33,33	2.426.057	438.160	9,20	655.717	13,77	1.108.577	45,69
7	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	11	1	5,88	3	17,65	3	27,27	1.155.817	291.595	13,85	363.610	17,27	434.011	37,55
8	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	10	3	30	3	30	6	60	3.879.415	1.030.913	26,57	1.373.570	35,41	1.761.953	45,42
9	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	1	0	0	0	0	0	0	373.570	16.774	4,49	40.378	10,81	120.339	32,21
TOTAL									13.865.508	3.009.803	21,71	4.179.680	30,14	6.301.108	45,44

**Pagu setelah penajaman belanja berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.05.03.2.04.26.260*

B. Capaian Program dan Kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Volume			Anggaran			Kendala/Hambatan
		Target	Realisasi TW II	Capaian %	*Pagu (Ribu)	Realisasi TW II (Ribu)	Capaian %	
1	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	4	2	50	310.464	134,537	43,33	Tidak ada Kendala
2	Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	8	5	62,50	2.117.118	1.252.538	59,16	Tidak ada Kendala
3	Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	1	1	100	881.726	330.889	37,53	Tidak ada Kendala
4	Dokumen Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan	4	0	0	1.373.058	526.382	38.34	Tidak ada Kendala
5	Rekomendasi Intelijen yang Berkualitas	19	10	52,63	1.348.283	631.880	46.87	Tidak ada Kendala
6	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	3	1	33,33	2.426.057	1.108.577	45,69	Tidak ada Kendala

No	Program dan Kegiatan	Volume			Anggaran			Kendala/Hambatan
		Target	Realisasi TW II	Capaian %	*Pagu (Ribu)	Realisasi TW II (Ribu)	Capaian %	
7	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	11	3	27,27	1.155.817	434.011	37,55	Tidak ada Kendala
8	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	10	6	60	3.879.415	1.761.953	45,42	Tidak ada Kendala
9	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	1	0	0	373.570	120.339	32,21	Tidak ada Kendala

**Pagu setelah penajaman belanja berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.05.03.2.04.26.260*

C. Capaian Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran

1. Capaian Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan April

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							*Pagu (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B4	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	19,58	30	65,27	87,1	22,47	78	25,09	3.581.874	729.755	20,37
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	58,25	44,3	131,49	77,88	74,79	76	76,64	9.973.170	2.172.933	21,79
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	86,4	-	86,4	-	95.395	29.223	30,63
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	75	-	76,77	-	64.399	24.995	38,81

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							*Pagu (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B4	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	3	-	5	-	68.773	24.995	3,35
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	2,91	-	3,05	-	81.895	27.898	34,07
TOTAL										13.865.508	3.009.802	21,71

2. Capaian Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Mei

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							*Pagu (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B5	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	19.58	30	65,27	87,1	22,47	78	25,09	3.581,874	1,019,327	28,46

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							*Pagu (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B5	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	60,75	44,3	137,13	77,88	78	76	79,93	9.973,170	3,042,905	30,51
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	86,4	-	86,4	-	95,395	32,152	33,70
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	75	-	76,77	-	64,399	27,464	42,65
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	3	-	5	-	68,773	27,464	39,93
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	2,91	-	3,05	-	81,895	30,367	37,08
TOTAL										13.865.508	4.179.680	30,14

3. Capaian Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Juni

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							*Pagu (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B6	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	42.56	45	94,58	87,1	48.86	78	54.56	3.581,874	1,542,588	43,02
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	71,79	58	123,78	77,88	92,18	76	94,46	9.973,170	4,623,982	46,36
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	86,4	-	86,4	-	95,395	36,257	38,01
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	75	-	76,77	-	64,399	31,269	48,56

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							*Pagu (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B6	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	3	-	5	-	68,773	31,269	45,47
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	2,91	-	3,05	-	81.895	35.740	43,64
TOTAL										13.865.508	6.301.108	45,44

**Pagu setelah penajaman belanja berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.05.03.2.04.26.260*

D. Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Matriks Rekomendasi Triwulan II

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Target indikator tidak tercapai karena ada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sehingga masih terdapat penyesuaian dalam penanganan perkara di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan	Melakukan sosialisasi implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP	Melakukan Pendampingan dalam proses penyidikan dan penyelesaian perkara	TW III 2026	T	-	-
2	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dan Pangan Olahan yang Optimal							
3	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	-	-	-	-
4	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	-	-	-	-
5	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	-	-	-	-
6	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nomor urut indikator
- (2) Diisi dengan nama indikator
- (3) Diisi dengan kendala/permasalahan dari tiap indikator
- (4) Diisi dengan rekomendasi berdasarkan arahan pimpinan untuk tiap kendala dari masing-masing indikator
- (5) Diisi dengan tindak lanjut atas rekomendasi. Rencana tindak lanjut dimungkinkan sama dengan rekomendasi atau merupakan tahapan pelaksanaan rekomendasi secara lebih rinci.
- (6) Diisi dengan waktu penyelesaian tindak lanjut/rekomendasi
- (7) Diisi Ya jika indikator/kendala/rekomendasi/rencana tindak lanjut telah dikelola sebagai risiko (terdapat dalam daftar risiko) Diisi Tidak jika indikator/kendala/rekomendasi/rencana tindak lanjut tidak/belum dikelola sebagai risiko (terdapat dalam daftar risiko).
- (8) Diisi (jika pada Kolom 7 dengan jawaban Ya) dengan kode risiko yang relevan dengan Rencana Tindak Lanjut (kolom 5) dan terdaftar dalam aplikasi SAPA APIP.
- (9) Diisi (jika pada Kolom 7 dengan jawaban Ya) dengan peristiwa risiko sesuai Kode Risiko pada kolom 8.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 15 Juli 2026

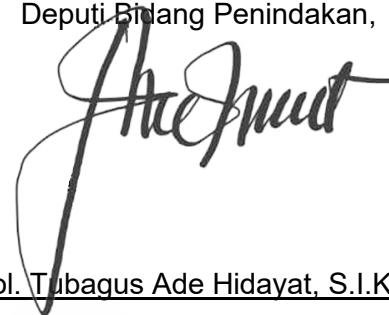
Ketua Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bayu Rastika'.

Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si., Apt., M.E

NIP 19810304 200312 2 001

Deputi Bidang Penindakan,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tubagus Ade Hidayat'.

Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K, M.Sos

NRP 70060445

**Lampiran a. Kertas Kerja Pengukuran dan Perhitungan Kinerja Deputi Bidang
Penindakan Triwulan II Tahun 2026**

I. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

➤ Definisi Operasional :

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
 - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
 - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
 - 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%
- c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
$$(\text{Jumlah Perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah Perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah Perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah Perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah Target Perkara} \times 100\%$$
- d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani siterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
- e. Perkara *carryover* yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1.

Perkara *carryover* dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

- f. Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.

➤ Cara Perhitungan

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

(Jumlah Perkara SPDP x 0.15 + Jumlah Perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah Perkara P21 x 0.85 + Jumlah Perkara Tahap II)

➤ Perhitungan Realisasi:

Tahapan	Target		Realisasi		Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi
	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over			
UPT							
SPDP	133	70	27	5	0.15	4.8	42.56
Tahap I			19	13	0.55	17.6	
P21			3	17	0.85	17	
Tahap II			14	33	1	47	
Total	133	70	63	68			

II. Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal

➤ Definisi Operasional :

Kegiatan Deteksi mencakup pelaksanaan dari kegiatan Siber, Cegah Tangkal dan Intelijen yang menghasilkan keluaran berupa rekomendasi antara lain:

1. Rekomendasi kegiatan siber sediaan farmasi dan makanan yaitu rekomendasi yang berisi informasi seluruh hasil analisis kegiatan siber beserta saran tindak lanjut yang diperlukan, meliputi kegiatan patroli siber pelanggaran peredaran sediaan farmasi dan makanan, profiling pelanggaran/kejahatan siber sediaan farmasi dan makanan, dan analisis digital forensik sediaan farmasi dan makanan. Rekomendasi kegiatan siber sediaan farmasi dan makanan yang dimanfaatkan adalah rekomendasi yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan.
2. Rekomendasi cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan makanan yaitu rekomendasi yang dihasilkan dari upaya cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan makanan, berupa: penyusunan analisis kejahatan sediaan farmasi dan makanan, penggalangan stakeholders dan analisis peta rawan kasus kejahatan sediaan farmasi dan makanan. Rekomendasi dianggap sudah ditindaklanjuti apabila stakeholders dan/atau unit terkait sudah melakukan proses selanjutnya dari rekomendasi yang disampaikan.
3. Rekomendasi Intelijen adalah rekomendasi dari Direktorat Intelijen yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindak lanjut yang disarankan. Rekomendasi intelijen yang berkualitas dihitung melalui survey kepuasan terhadap pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi intelijen.

➤ Cara Perhitungan :

- a. Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan

- b. Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti
- c. Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti

$$\text{Rumus : } \frac{a+b+c}{3} \times 100\%$$

➤ Perhitungan Realisasi:

Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Persentase Rekomendasi Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	0	0	94,74	94,74	94,74	93,54
Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti	0	0	0	0	0	31,82
Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti	0	0	50	80	87,50	90
Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	0	0	48,25	58,25	60,75	71,79

III. Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan

➤ Definisi Operasional :

- a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean governance* menuju BPOM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.
- c. Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
 - 1) Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
 - 2) Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

➤ Cara Perhitungan :

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assesment* dan reuiu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua) komponen, yaitu:

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8 %
2	Penataan Tatalaksana	7 %
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10 %
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10 %
5	Penguatan Pengawasan	15 %
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10 %

NO	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang Prima	17,5 %

➤ Perhitungan Akhir Tahun

Target ditetapkan di akhir tahun

IV. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Penindakan

➤ Definisi Operasional

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN-RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.
- d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di Lingkungan BPOM.

➤ Cara Perhitungan

Penjumlahan 4 (empat) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- 1) Perencanaan Kinerja;
- 2) Pengukuran Kinerja;
- 3) Pelaporan Kinerja;

4) Evaluasi Kinerja Internal;

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Kinerja Internal	25
Nilai Evaluasi		100

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i>. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak
7	D	>0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

➤ Perhitungan Akhir Tahun

Target ditetapkan di akhir tahun

V. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan

➤ Definisi Operasional

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- c. 8 (delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - 1) Revisi DIPA (bobot 10%)
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 - 3) Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 - 4) Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 - 5) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 - 6) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)

- 7) Capaian Output (bobot 25%)
- 8) Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
- d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
 1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

➤ Cara Perhitungan:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$
 Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

➤ Perhitungan Akhir Tahun:

Target ditetapkan di akhir tahun

VI. Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan

➤ Definisi Operasional:

- a. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi.

- c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) katageri. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen Risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaia/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberika pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

- d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:
- 1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada *stakeholder* bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
 - 2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
 - 3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

➤ Cara Menghitung

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama.

➤ Perhitungan Akhir Tahun:

Target ditetapkan di akhir tahun

Lampiran b.

NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN II

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2026
Waktu : 13.00 – selesai
Tempat : Ruang Rapat Batik Lantai 4
Pemimpin Rapat : Ketua Tim SAKIP Deputy Bidang Penindakan
Peserta Rapat : Tim SAKIP Deputy Bidang Penindakan

II. Pembahasan

1. Memantau pencapaian kinerja dan realisasi anggaran
2. Pembahasan terkait laporan evaluasi internal TW II

III. Hasil Pembahasan Rapat

A. Pembukaan dan Arahan Ketua Tim SAKIP Deputy Bidang Penindakan

1. Sehubungan telah berakhirnya periode triwulan II, mengingatkan batas pelaporan monitoring dan evaluasi yaitu tanggal 15 Juli 2026 untuk Berita Acara Laporan Evaluasi Internal Triwulan II
2. Dengan adanya perubahan Direktorat di Lingkungan Kedeputan Bidang Penindakan maka dapat mempengaruhi perubahan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Deputy Bidang Penindakan.
3. Diharapkan adanya pertemuan dengan Inspektorat terkait penyampaian Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi sebelumnya, namun akan menunggu keputusan dari KPA terbaru.
4. Capaian realisasi indikator rekomendasi dari 3 Unit Kerja di Lingkungan Kedeputan Bidang Penindakan yaitu Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obar dan Makanan melampaui target dengan capaian diatas 100% sehingga rata-rata capaian Indikator Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal melampaui target dengan capaian diatas 110%.
5. Tingginya Realisasi pada indikator persentase rekomendasi deteksi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang optimal bukan merupakan angka yang konstan atau merupakan angka yang fluktuatif sehingga memungkinkan untuk naik dan turun.
6. Untuk indikator dengan capaian yang sangat tinggi akan dilakukan peninjauan ulang di Triwulan III apabila diperlukan akan dilakukan penyesuaian target.

7. Realisasi Anggaran yang sudah digunakan sampai dengan Juni 2026 sejumlah Rp6.301.108.926 (45,44%)
8. Mengidentifikasi Kendala/Permasalahan, Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut untuk Indikator yang tidak mencapai target yaitu untuk Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
9. Hasil Monev akan dituangkan dalam paparan Rapat Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran Triwulan II Tahun 2026 bersama Bapak Deputi Bidang Penindakan.
10. Penandatanganan pada Laporan Evaluasi Internal Triwulan II hanya Ketua Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan dan Deputi Bidang Penindakan

Notulis : Intan Anggraeni Putri

IV. Dokumentasi



V. Undangan dan Daftar Hadir



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : PR.08.04.6.07.26.48 Jakarta, 08 Juli 2026
Lampiran : -
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Internal Kedeputian
Bidang Penindakan Triwulan II, dan Tahunan Anggaran 2026

Yth. Seluruh Direktorat di Kedeputian Bidang Penindakan, dan Tim SAKIP Deputi Bidang
Penindakan
Di Tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan program/kegiatan Triwulan II Tahun
2026, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat yang akan dilakukan
pada:

Hari, tanggal : Kamis , 09 Juli 2026
Waktu : Pukul 13:00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 4 Gedung Batik
Pimpinan Rapat : Deputi Bidang Penindakan

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, diucapkan terima
kasih.

Deputi Bidang Penindakan



Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K, M.Sos

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR HADIR
09 Juli 2026
Rapat Monitoring dan Evaluasi Internal Kedeputan Bidang Penindakan

No	Nama	NIP	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	TTD
1	Doni Dwi	1990091007100	Per	CT CT	
2	Syukran Akbar	19930814 201003 1001	Perencana	Dit. Siber	
3	Iman Agus Galang	1992051201031004	Perencana	Dit. CT	
4	Amir Nurro	199612162005 211005	PIO	Biro umum	
5	Ni Kebut Ayu Dwi	200208182025012003	Perencana	CT	
6	Linda Octaviani	19851008 200812 2002	PFM	Dit. Penyidikan	
7	Intan A Putri	200205172025062004	PFM	Dit. IOM	
8	Andi M	19910616 200001 2000	Perencana	Dit. IOM	
9	Apriana Desma K.	199909042104012001	Deputi Terampai	Dit. Sidik	
10	Fajar Bayu F	199712312025061006	Perencana	Dit. Siber	
11	M. Harni Alwasyl	19790405 200501 1003	Perencana	Dit. Siber	
12	Titi Haidarjani	1985013202062001	AK Ahli Pertama	Perencana	
13	Wahmanti F	198503312008121001	Sekretaris 4		
14	Kelvin Dap	199402172019031005	Perencana	Rorekben	
15	Lina Nurul I	199304132023042038	Perencana	Dit. Penyidikan	
16	Fauziahinda Dewi	199910022025242023	Perencana	Dit. Penyidikan	
17	Mohawati Prihatin P	199308262025040109	PIO	Dit. Penyidikan	

No	Nama	NIP	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	TTD
18	Eryanto				
19	Izmi Lutfi S.	199602232025062007	Perencana	Dit. IOM	
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Penanggung Jawab Kegiatan

Adinda Meutia, S.Farm, Apt., M.Kom

LAMPIRAN MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI ATAS CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2026

No	RO	Kondisi awal/ kondisi periode sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Monitoring RTL periode sebelumnya			Upaya Pencapaian Target (Diisi jika target tercapai)
									Rencana Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	Selesai / Belum	Jika Belum isi Timeline Penyelesaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	Tidak ada kendala	4	2	50	Tidak ada Kendala	Monitoring pencapaian target periode berikutnya	TW III 2026	Telah dilakukan monitoring pencapaian target	Selesai TW II 2026		
2	Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	Tidak ada kendala	8	5	62,50	Tidak ada Kendala	Monitoring pencapaian target periode berikutnya	TW III 2026	Telah dilakukan monitoring pencapaian target	Selesai TW II 2026		
3	Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	Tidak ada kendala	1	1	100	Tidak ada Kendala	Monitoring pencapaian target periode berikutnya	TW III 2026	Telah dilakukan monitoring pencapaian target	Selesai TW II 2026		Melakukan penyusunan profil kerawanan kejahatan Obat dan Makanan berdasarkan laporan data kerawanan kejahatan yang disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia.

No	RO	Kondisi awal/ kondisi periode sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Monitoring RTL periode sebelumnya			Upaya Pencapaian Target (Diisi jika target tercapai)
									Rencana Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	Selesai / Belum	Jika Belum isi Timeline Penyelesaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Dokumen Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan	Tidak ada kendala	4	0	0	Tidak ada Kendala	Monitoring pencapaian target periode berikutnya	TW III 2026	Telah dilakukan monitoring pencapaian target	Selesai TW II 2026		
5	Rekomendasi Intelijen yang Berkualitas	Tidak ada kendala	19	10	52,63	Tidak ada Kendala	Monitoring pencapaian target periode berikutnya	TW III 2026	Telah dilakukan monitoring pencapaian target	Selesai TW II 2026		
6	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	Tidak ada kendala	3	1	33,33	Tidak ada Kendala	Monitoring pencapaian target periode berikutnya	TW III 2026	Telah dilakukan monitoring pencapaian target	Selesai TW II 2026		
7	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	Tidak ada kendala	11	3	27,27	Tidak ada Kendala	Monitoring pencapaian target periode berikutnya	TW III 2026	Telah dilakukan monitoring pencapaian target	Selesai TW II 2026		
8	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	Tidak ada kendala	10	6	60	Tidak ada Kendala	Monitoring pencapaian target periode berikutnya	TW III 2026	Telah dilakukan monitoring pencapaian target	Selesai TW II 2026		
9	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi	Tidak ada kendala	1	0	0	Tidak ada Kendala	Monitoring pencapaian	TW III 2026	Telah dilakukan monitoring	Selesai TW II 2026		

No	RO	Kondisi awal/ kondisi periode sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Monitoring RTL periode sebelumnya			Upaya Pencapaian Target (Diisi jika target tercapai)
									Rencana Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	Selesai / Belum	Jika Belum isi Timeline Penyelesaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Rekomendasi Tindaklanjuti Patroli Siber						target periode berikutnya		pencapaian target			

Keterangan :

- (1) Diisi dengan nomor urut KRO/RO
- (2) Diisi dengan nama KRO/RO
- (3) Diisi mulai Triwulan I/II/III/IV, isi narasi terkait capaian output pada Triwulan I/II/III tercapai atau tidak
- (4) Diisi dengan target KRO/RO
- (5) Diisi dengan realisasi KRO/RO
- (6) Diisi dengan capaian KRO/RO
- (7) Diisi dengan kendala/hambatan atas capaian KRO/RO pada Triwulan *on going*
- (8) Diisi dengan Rencana tindaklanjuti atas kendala/hambatan pada Triwulan *on going*
- (9) Diisi dengan Batas waktu pemenuhan rencana tindaklanjuti atas kendala/hambatan pada Triwulan *on going*
- (10) Diisi dengan rencana tindak lanjut atas kendala/hambatan pada periode sebelumnya
- (11) Diisi dengan simpulan rencana tindaklanjuti triwulan sebelumnya sudah selesai atau belum selesai
- (12) Diisi jika belum selesai diisi batas waktu penyelesaian rencana tindak lanjut periode sebelumnya
- (13) Diisi upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian realisasi *on going*

LAMPIRAN MATRIKS STATUS TINDAKLANJUT REKOMENDASI TRIWULAN II TAHUN 2026

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Target indikator keberhasilan tidak tercapai karena terdapat pemotongan anggaran yang menyebabkan penyesuaian (target awal 197 perkara menjadi perkara 115). Namun demikian usulan penyesuaian tersebut belum dapat disahkan, menunggu persetujuan dari DJA sehingga	Melakukan revisi terhadap target perkara sesuai dengan pemotongan anggaran	Melakukan monitoring terhadap usulan penyesuaian target DJA	Selesai					

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		dalam perhitungan masih menggunakan target lama.								
2	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Tidak ada Kendala								
3	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	Tidak ada Kendala								

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	Belum optimalnya implementasi manajemen risiko yang ditandai adanya sejumlah catatan atas implementasi manajemen risiko yang ada pada laporan hasil penilaian manajemen risiko tahun 2025	Melakukan perbaikan sesuai rekomendasi perbaikan dalam laporan hasil penilaian manajemen risiko tahun 2025	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perbaikan sesuai rekomendasi perbaikan dalam laporan hasil penilaian manajemen risiko	Selesai	Selesai		T	-	-